

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional pada hakikatnya upaya secara sadar untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang ideal. Para ahli ekonomi sejak dulu telah melakukan berbagai pengkajian mengenai konsep-konsep perubahan pola pikir masyarakat yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Supaya usaha pembangunan dapat secara maksimal digunakan untuk membangun perekonomian daerah dan perekonomian secara keseluruhan, maka usaha-usaha tersebut haruslah direncanakan dan diarahkan bukan saja oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Disamping itu haruslah diantara kedua badan ini saling berkoordinasi dan penyelarasan tindakan yang sebaik-baiknya.

Pembangunan di propinsi Riau sebelum diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengalami proses pembangunan yang sangat lamban dan tersendat-sendat. Dengan mengandalkan sedikit kewenangan dan kemampuan keuangan pemerintah ketika itu, sebenarnya pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten telah berusaha dan berupaya dengan segenap kemampuannya untuk kemajuan

Dengan melihat kondisi Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah propinsi Riau, kondisi pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini masih jauh tertinggal, tidak saja bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain yang berada di pulau Jawa dan kawasan lainnya, tetapi termasuk dengan kabupaten/kota yang berada di pulau Sumatera dan propinsi Riau.

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang tergabung ke dalam wilayah kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Kuantan Mudik mempunyai potensi yang sangat besar untuk pembangunan masyarakatnya, hal itu dapat terlihat dari sumber daya alam (SDA) yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kuantan Mudik. Dengan luasnya daerah perkebunan, hasil hutan yang melimpah, objek-objek wisata yang potensial, diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat Kuantan Singingi umumnya dan Kecamatan Kuantan Mudik khususnya.

Jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik memiliki potensi yang lebih baik. Dari potensi-potensi yang telah dijelaskan di atas, Kecamatan Kuantan Mudik hendaknya bisa memposisikan diri sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kenyataan yang ada saat ini sangat bertolak belakang dengan yang diharapkan, kalau kita telusuri dan cermati keadaan masyarakat dalam wilayah

yang terabaikan dan mungkin belum tersentuh selama ini. Angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran, anak putus sekolah, kurangnya sarana umum, merupakan masalah yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah sebuah wilayah yang mempunyai sumber daya alam (SDA) melimpah seperti Kecamatan Kuantan Mudik.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

“Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. “Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional”<sup>1</sup>

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjalankan roda pembangunan , sekaligus dalam hal pelayanan administrasi masyarakat, dituntut untuk mengambil peran dan kesiapannya untuk ambil bagian dalam menjalankan prinsip otonomi daerah tersebut.

Program pengembangan pembangunan wilayah kecamatan secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

---

Pemerintah kecamatan Kuantan Mudik yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi diharapkan bisa menjalin kerja sama yang kuat demi mengangkat derajat hidup masyarakat Kuantan Singingi pada umumnya dan masyarakat Kuantan Mudik pada khususnya dari segala keterpurukan dan ketertinggalan selama ini, Sekaligus membangun wilayah kecamatan Kuantan Mudik dengan segala prasarana dan sarana yang berimbas pada meningkatnya perekonomian masyarakat kecamatan Kuantan Mudik.

Untuk itu penyusun ingin mengetahui sejauh mana peran kecamatan Kuantan Mudik dalam perkembangan perekonomian kabupaten Kuantan Singingi, agar masalah pengangguran, kemiskinan dan anak putus sekolah bisa diatasi semaksimal mungkin.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan masalah yakni bagaimana peran kecamatan Kuantan Mudik dalam perkembangan perekonomian kabupaten Kuantan Singingi.

## **C. KERANGKA DASAR TEORI**

### **1. PERAN KECAMATAN**

#### **1.1 Peran**

Berbicara masalah peran, tidak lepas dari status yang merupakan

Menurut Soerjono Soekanto adalah:

“peran atau role adalah merupakan aspek dinamis daripada kedudukan (status). Jadi apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya, maka dia menjalankan perannya”<sup>3</sup>

Menurut Ralf Lynton tentang peran adalah:

“Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan dan dalam hal ini sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya”<sup>4</sup>

Peran menurut Miftah Thoha sehubungan dengan peran seorang manajer adalah menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.” Istilah peran kita pinjam dari panggung teater untuk menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Manajer memainkan perannya sebagai kewajiban yang tidak harus dimainkan.

Peran adalah atau unsur manusia dalam organisasi pemerintahan yang disebut dengan aparatur atau pegawai-pegawai yang mempunyai kedudukan serta peran yang dapat menentukan dalam mencapai suatu pembangunan di pemerintahan daerah khususnya kecamatan.

Peran pemerintah di tingkat kecamatan merupakan satu wadah, keterlibatan dan keikutsertaan aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga begitu pentingnya

---

<sup>3</sup> *Sosiologi Suatu Pengantar Tahun 1990, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*

kedudukan aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, maka sangat dibutuhkan sekali aparat yang mempunyai kemampuan yang baik. Sehingga peran bisa dikatakan sebagai suatu keterlibatan, keikutsertaan dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa peran seorang aparat atau pegawai dalam hal ini merupakan suatu unsur keikutsertaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan kemudian didukung oleh suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pegawai yang dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang luas dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan kedudukan atau tugas pokoknya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya.

## 1.2 Kecamatan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

“Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat

terfokus untuk pengembangan (sosial, budaya, ekonomi, politik dll) masyarakat di wilayah masing-masing”<sup>5</sup>

Setelah mencermati teori di atas, kecamatan sebagai instansi yang berdiri langsung di bawah pemerintah Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi yang lebih dominan sebelum diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah, yaitu sebagai perpanjangan tangan dari wewenang yang didapat pemerintah Kabupaten dan Kota.

Disisi lain kecamatan juga merupakan suatu wilayah kerja seseorang aparatur dalam hal ini dapat dikatakan Camat sebagai perangkat daerah yang ada pada tingkat kecamatan, sedangkan pada pemerintah kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah.

Secara hirarkis, struktur pemerintah kecamatan adalah bawahan dari pemerintah kabupaern atau kota. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Oleh karena itu, dengan kedudukan dan kewenangan untuk mengatur dan pengelolaan pemerintah kecamatan sangat tergantung bagaimana pemerintah pada level di atasnya yang membuat kebijakan dalam pelaksanaan tata pemerintahan.

Selain itu dilihat dari hirarkis pemerintah daerah , kecamatan berada dalam posisi yang amat strategis, yakni menghubungkan antara Kabupaten dan Desa. Hal ini menciptakan peluang bagi kecamatan

untuk mengambil peran dengan melakukan komunikasi dan interaksi dua arah secara bersamaan. Ketika berhadapan dengan kabupaten, kecamatan memposisikan dirinya sebagai “speaker” kepentingan-kepentingan masyarakat desa di wilayahnya.

Sedangkan ketika berhadapan dengan masyarakat desa, kecamatan memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan memberikan pelayanan publik yang maksimal sekaligus menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, untuk kemudian diolah dan diperjuangkan kembali ketika berhadapan dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, kecamatan juga harus mampu menterjemahkan seluruh kebijakan pemerintah kabupaten untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga secara jelas masyarakat dapat menangkap dan memahani kebijakan pemerintah daerah, yang pada akhirnya diharapkan tumbuh partisipasi aktif dari masyarakat.

Dengan demikian, kecamatan dalam konteks ini adalah sebagai institusi tengah, sebagai eksekutor pelayanan publik tingkat tengah, sekaligus jembatan penghubung antara kabupaten dan desa. Sedangkan kecamatan menurut Undang-undang Otonomi daerah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah Bab V pasal 66 yang berbunyi :

- a. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat.
- c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah



- d. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- e. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- f. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>6</sup>

## 2. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN

### 2.1 Perkembangan

Kata perkembangan berasal dari kata “berkembang” yang mengandung makna:

“suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.” Dengan kata lain pengembangan bertambah menjadi membaik dan banyak, membuat supaya menjadi besar suatu usaha yang dikelola”<sup>7</sup>

Program pengembangan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan masyarakat saat ini maupun untuk masa depan. perkembangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat banyak.

### 2.2 Perekonomian

Kata ekonomi (economy) berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang merujuk kepada pihak-pihak yang mengelola rumah tangga.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999, Citra Umbara, Bandung

Menurut Profesor P.A. Samuelson :

“Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu mengenai individu-individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan tanpa penggunaan uang. Dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan sekarang dan dimasa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat”<sup>8</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang fluktuatif, terkadang pada saat tertentu dapat tumbuh dengan sangat tinggi, tetapi suatu saat juga akan mengalami penurunan. pada saat tingkat ekonomi tinggi maka standar hidup masyarakat juga meningkat dan akan tersedia lapangan pekerjaan, akan tetapi, pada saat pertumbuhan ekonomi rendah, maka berdampak pula pada standar hidup yang akan menurun dan juga berdampak pada tingginya tingkat pengangguran akibat sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ada beberapa faktor penting yang menentukan lokasi kawasan pengembangan strategis adalah posisi geografis, sumber daya alam, ketersediaan infra struktur dan keterkaitan inter-regional.

#### a. Lokasi geografis

Kriteria ini merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi kawasan pengembangan strategis dalam lokasi pusat pasar domestik maupun internasional. Demikian halnya dengan lokasi

sumber daya alam yang menghasilkan proses produksi lebih lanjut dan dapat meminimalkan biaya transportasi.

b. Sumber Daya Alam

Kriteria ini ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial yang menentukan lokasi kawasan pengembangan strategis.

c. Infra Struktur Regional

Faktor ketiga ini penting untuk menentukan lokasi kawasan pengembangan strategis dalam kawasan yang mempunyai infrastruktur regional yang potensial yang mendukung sektor produksi, pasar domestik internasional dan kawasan pedalaman.

d. Keterkaitan Antar Regional

Faktor ini merupakan kriteria untuk mempercepat pembangunan pekonomi yang memerlukan keterkaitan antar regional dalam kawasan tersebut.

### 2.3 Kabupaten

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”<sup>9</sup>

Kabupaten merupakan instansi pemerintahan yang berdiri setelah propinsi, seiring diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah tahun 2004, kabupaten mempunyai wewenang dan tugas serta fungsi membangun daerahnya masing-masing, dalam artian

mengelola sumber-sumber potensial tiap-tiap daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing daerah.

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, namun sebelum hal tersebut dapat terlaksana, partai politik dan kelompok masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana.

Sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah tahun 2004 pasal 155 ayat satu dan dua tentang keuangan daerah adalah :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam pasal 157 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjelaskan bahwa :

“Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:

1. hasil pajak daerah

2. hasil retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain PAD yang sah.<sup>11</sup>

Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kecamatan.

#### D. DEFINISI KONSEP

“Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.”<sup>12</sup>

Konsep merupakan generalisasi dari sebuah fenomena tertentu sehingga dapat dipahami dan dimengerti tidak terjadi kesalahpahaman dari masing-masing variabel. Definisi konsep merupakan suatu hal yang mesti menjadi bahasan disetiap penulisan karya tulis dalam hal ini skripsi, selalu dicantumkan definisi konsep yang menuntun penulis dalam menyusun kerangka berpikir.

Adapun definisi konsep yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat.
2. Kecamatan merupakan perangkat pemerintahan yang dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dari ketertinggalan yang terjadi saat ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada..

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam definisi operasional, penelitian akan mengkaji beberapa hal yang menjadi landasan untuk membuat kesimpulan dan memberikan saran, antara lain :

1. Peran Kecamatan Kuantan Mudik dalam perkembangan perekonomian Kuantan Singingi. Ditinjau dari beberapa sektor, antara lain :
  - Retribusi Pasar
  - Pajak Hotel dan Restoran

2. Potensi pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik. Hal ini akan digali melalui beberapa strategi, antara lain :
  - Strategi pengembangan pendidikan
  - Strategi peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendukung di Kecamatan Kuantan Mudik.
  - Strategi penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Kuantan Mudik.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Kuantan Mudik dalam pengembangan Kecamatan.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Untuk dapat mendiskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam permasalahan yang diteliti.

“Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan implementasi yang tepat, melukiskan atau menggambarkan informasi-informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan saat ini.”<sup>13</sup>

Adapun penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Dengan kata lain

---

<sup>13</sup> *Metode penelitian survai 1989 LP3ES, Jakarta*

penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Dengan demikian penyusun akan mendiskripsikan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Adapun ciri-ciri pokok dan jenis penelitian deskriptif adalah :

- a. Memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi nasional yang sedang terjadi.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebuah kecamatan yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi di Daerah Propinsi Riau.

Awal mulanya penelitian ini dilakukan karena adanya masalah yang terdapat di kecamatan Kuantan mudik, yaitu masalah ketertinggalan pembangunan khususnya bidang ekonomi masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat yang selalu hidup serba kekurangan,



Hal di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan kehidupan kecamatan lain yang sama-sama tergabung dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Padahal perbedaan keadaan itu tidak harus terjadi melihat sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik.

Melalui penelitian ini diharapkan bisa mengetahui seberapa besar perbedaan kehidupan perekonomian masyarakat lintas kecamatan dan seberapa jauh usaha pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pemerintah kecamatan Kuantan Mudik dalam menyikapi hal diatas dalam kerangka Otonomi Daerah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penulis mengguakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview/wawancara dan dokumentasi.

#### a. Teknik Observasi /Pengamatan

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti dengan terjun langsung kepada objek penelitian.

“Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan terhadap gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan,”<sup>14</sup>

Melalui teknik ini peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari subjek-subjek penelitian. Dengan observasi setidaknya dapat mengetahui kondisi kator Kecamatan Kuantan Mudik dan

---

<sup>14</sup> *Metode penelitian survai 1989 LP3ES, Jakarta*

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai sewaktu melakukan penelitian di lapangan.

b. Metode Interview

“Metode interview adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengumpulkan data dengan jalan komunikasi langsung dengan subjek peneliti baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.”<sup>15</sup>

Dengan teknik ini peneliti langsung melakukan komunikasi dan bertatap muka dengan sampel yang telah ditentukan yaitu pegawai pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen pada instansi/lembaga terkait agar bisa digunakan sebagai data penunjang data interview dan observasi. Atara lain data sekunder ini tentang kondisi geografis, demografis pemerintahan, struktur pemerintahan kecamatan, dan laporan kegiatan tahunan pemerintah kecamatan.

4. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek penelitian sebagai satu kesatuan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan unit analisis adalah lokasi yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu : Peran

---

<sup>15</sup> *Metode penelitian survai 1989 LP3ES, Jakarta*

Kecamatan Kuantan Mudik Dalam Perkembangan Perekonomian  
Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehubungan dengan judul di atas, maka unit analisis bertempat di